

ABSTRAK

Farhan Abdul Halim (1213040039), 2025 *Kedudukan Hukum Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammadiyah Dan Persatuan Islam.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, termasuk dalam kepemimpinan organisasi dan perusahaan. Namun, sebagian ulama masih menolak kepemimpinan perempuan dengan merujuk pada teks Al-Qur'an dan Hadis serta alasan kodrati. Perbedaan pandangan ini sering dimanfaatkan secara politis dan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, kajian terhadap fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS menjadi penting untuk memperoleh kepastian hukum secara objektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam. 2) Mekanisme penerbitan fatwa, dalil hukum, dan dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam dan 3) Dampak dan implikasi dari fatwa yang diterbitkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam.

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi teori hukum Islam, teori perbandingan hukum, dan teori fatwa. Teori hukum Islam digunakan untuk memahami dasar syariat, teori perbandingan hukum menganalisis perbedaan dan persamaan fatwa kepemimpinan perempuan antara Muhammadiyah dan Persis, sementara teori fatwa menjelaskan proses ijtihad dalam merespons isu sosial keagamaan. Ketiganya digunakan secara terpadu untuk menelaah produk hukum dan dinamika pemikiran kedua organisasi.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menggali dan menelaah sumber utama kemudian mencari data-data pada literatur yang berkaitan. jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif, karena bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai hukum Kepemimpinan Perempuan menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor dari lahirnya fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam yaitu sebagai respons terhadap meningkatnya peran perempuan di ruang publik serta perbedaan pandangan umat Islam. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih bersikap progresif dengan menjadikan tajdid sebagai dasar pembentukan fatwa dan menyelaraskan kebutuhan umat secara kontekstual, sedangkan PERSIS melalui Dewan Hisbah bersikap lebih konservatif namun tetap membuka ruang ijtihad terbatas. 2) Mekanisme penerbitan fatwa di kedua organisasi dilakukan secara kolektif dan sistematis dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, qiyās, dan masalah melalui forum musyawarah resmi. 3) Dampak dan implikasi fatwa Muhammadiyah mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kepemimpinan publik tanpa batasan jabatan tertentu, sementara fatwa PERSIS memberikan ruang kepemimpinan dengan syarat ketat dan melarang jabatan tertinggi seperti presiden. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam kontemporer dalam merespons isu kepemimpinan perempuan secara proporsional dan kontekstual.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Muhammadiyah, Persatuan Islam.